



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MAGHFIRAWATI ALDILA
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 843499

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 995.000.000

1. Tanah Seluas 134 m2 di KAB / KOTA KOTA SAWAHLUNTO , Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 109 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA SAWAHLUNTO , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah Seluas 1.966 m2 di KAB / KOTA KOTA SAWAHLUNTO , HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA SAWAHLUNTO , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m2/138 m2 di KAB / KOTA KOTA SAWAHLUNTO , HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 91.000.000

1. MOTOR, HONDA D1B02N12L2A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOBIL, TOYOTA MANUAL Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 18.810.655

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.104.810.655

**III. HUTANG****Rp. 180.000.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 924.810.655****Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.